

USAHA ADAPTASI MASYARAKAT JAWA DALAM PEMBANGUNAN BANDARA KUALANAMU

Iswan Kaputra, Usman Pelly

Program Studi Antropologi Sosial, Pasca Sarjana Universitas Negeri Medan
usmanpelly32@gmail.com

Abstrak

Masyarakat Jawa Pasar VI Kualanamu terancam tergusur dari pemukiman di mana 4 generasi masyarakat telah menetap di sana. Ancaman ini membuat mereka gusar dan berupaya mencari cara, sebagai bentuk strategi adaptasi, untuk menyelamatkan pemukiman dan lahan pertanian. Mendapatkan dukungan materil, moril dan intelektual, merupakan strategi perjuangan yang dilakukan dengan damai (*non-violence*/tanpa kekerasan). Saat itu muncul perubahan pola pikir masyarakat Jawa Pasar VI Kualanamu. Awalnya perlawanan bertujuan mempertahankan kampung halamannya, kemudian berubah dengan menurunkan target tujuan, yakni memperjuangkan relokasi (pemindahan kolektif warga). Tuntutan relokasi merupakan tuntutan minimalis dari masyarakat Pasar VI Kualanamu. Penurunan target perjuangan masyarakat Jawa Pasar VI Kualanamu merupakan satu bentuk adaptasi dari keterdesakan dan tidak punya pilihan.

Kata Kunci: Adaptasi, Strategi, Masyarakat Jawa, Pembangunan.

Abstract

The Java community of Pasar VI Kualanamu is threatened with displacement from settlements where 4 generations of people have settled there. This threat makes them upset and seeks to find ways, as a form of adaptation strategy, to save settlements and farmland. Getting material support, morale and intellectual, is a peaceful struggle strategy (*non-violence / non-violence*). At that time, there was a change of thinking pattern of Java people of Pasar VI Kualanamu. Initially the resistance was aimed at defending his hometown, then changed by lowering the goal target, namely fighting for relocation (collective transfer of citizens). The demands of relocation are the minimalist guidance from the society of Pasar VI Kualanamu. The decline of the target of the Java community struggle Pasar Kualanamu is a form of adaptation of the urgency and no choice.

Keywords: Adaptation, Strategy, Java Society, Development.

I. PENDAHULUAN

Penelitian tentang masyarakat yang diasumsikan menjadi korban dalam pembangunan proyek-proyek besar seperti Bandara Internasional Kualanamu dalam skema Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), masih sangat minim dilakukan secara akademik, khususnya di Sumatera Utara.

Pembangunan-pembangunan mega proyek tersebut sangat besar dan meluas, sehingga akan mempengaruhi peradaban bagi manusia, makhluk hidup lain, dan sumber daya alam yang ada pada konteks local, di mana pembangunan diletakkan. Pelaksanaan pembangunan menyisakan banyak cerita, terutama masalah yang tidak terselesaikan dalam prosesnya. Namun, pembangunan jalan terus dan akhirnya selesai dan digunakan untuk fungsi kehidupan demi kelangsungan manusia dan peradabannya, meskipun kerap diasumsikan mengorbankan (bersifat eksploitatif) pada manusia, makhluk lain dan berbagai keberadaan benda mati (Sumber Daya Alam – SDA).

Kehidupan manusia yang kompleks terus berubah bersama dengan budayanya dan merupakan aspek penting yang harus dicermati dalam proses pembangunan. Pembangunan yang berkeadilan, termasuk bagi budaya lokal, beserta kebiasaan, dan adat istiadatnya harus didorong terus-menerus, sehingga didapatkan sistem pembangunan yang baik dan adil.

Mengerucut pada pembangunan mega proyek Bandara Internasional Kualanamu juga tidak lepas dari asumsi-asumsi yang telah disebut di atas. Keterkaitan pembangunan tersebut dengan masyarakat Jawa yang berada tepat di tengah area pembangunan merupakan fenomena menarik untuk dicermati, bahkan diteliti lebih jauh. Bagaimana hal ini dipandang dari sudut antropologi, khususnya antropologi pembangunan?

Mengungkap sisi-sisi pembangunan dari sudut pandang masyarakat Jawa Kualanamu bersama budayanya merupakan cara berbeda dalam mengungkap kerugian yang diderita masyarakat lokal dan perubahan yang terjadi pada mereka. Perubahan dipandang sebagai strategi atau pola adaptasi masyarakat lokal menyikapi perubahan lingkungan (dalam konteks ini adalah proses modernisasi).

Dalam riset pada komunitas kecil yang direncanakan, tulisan ini akan memfokuskan kajian pada perspektif masyarakat Jawa, Desa Pasar VI Kualanamu yang diasumsikan sebagai korban pembangunan bandara yang akhirnya hak ekonomi, sosial dan budayanya diasumsikan sangat terganggu, bahkan hilang karena sumberdaya agraria yang dimiliki masyarakat diasumsikan juga terenggut oleh pembangunan proyek bandara tersebut.

Adaptasi dapat dilihat sebagai usaha untuk memelihara kondisi kehidupan dalam menghadapi perubahan. Dengan demikian definisi adaptasi selalu berkaitan erat dengan pengukuran, di mana tingkat keberhasilan suatu *organisme* (kelompok sosial) dapat bertahan hidup. Adaptasi yang dilakukan populasi sebagai suatu keseluruhan yang lengkap/bulat lebih menjanjikan hasil dari tekanan seleksi variasi, di mana populasi menjadi subyek dan dari tingkat pemvariasian resistensi pada adaptasi dalam tujuan yang berbeda.

Adaptasi tidak selalu dihubungkan pada penegasan lingkungan secara normatif, tetapi dalam beberapa hal dilihat dari lingkungan atau hanya kondisi yang ekstrim. Adaptasi dipandang sebagai respon kultural atau proses yang terbuka pada proses modifikasi, di mana penanggulangan dengan kondisi untuk kehidupan reproduksi selektif dan memperluasnya. Ukuran-ukuran bekerja berdasar pada adaptasi yang dilibatkan, dan lebih penting lagi, pada bahaya/resiko yang mana perubahan adalah adaptif (Hardestry, 1977).

Adaptasi merupakan daya tahan/kelangsungan hidup kelompok, reproduksi, dan fungsi-fungsi yang efektif dalam suatu kerangka agar elemen-elemen ini bekerja sesuai dengan tugasnya. Pencapaian dari tipe hubungan yang semangat/bergairah selalu merupakan hasil modifikasi *reprokal* dalam budaya dan habitat melalui perubahan dalam

sistem energi kelompok dan organisasi hubungan sosial selama periode yang panjang. Aspek historikal dari proses adaptasi adalah apa yang kita sebut dengan evolusi kebudayaan, apa yang kita maksud dengan proses dari perubahan kebudayaan. Dalam antropologi ketika berbicara tentang adaptasi, kita memfokuskan diri kepada kelompok sosial, tidak individual. Kelompok ini (institusi/komunitas/organisasi) tidak secara langsung teramati, mereka merupakan abstraksi dari perilaku individual yang diamati. Lebih spesifik, kita berbicara tentang institusi yang ada dalam masyarakat, tetapi yang kita pelajari adalah individu.

Ada 2 alasan prinsip untuk hal tersebut, yang berhubungan antara satu dengan yang lain. Pertama adalah pertimbangan praktis dan yang kedua adalah teorikal. Respon adaptif individu yang dipelajari dapat ditransmisikan kepada yang lain secara independen dalam membawa sifat. Dalam prakteknya, adaptasi manusia terhadap lingkungan khusus melibatkan kombinasi dari tipe-tipe modifikasi yang berbeda ini (Ellen, 1982). Respon perilaku dianggap mempunyai respon kecepatan yang tinggi dan secara khusus menyesuaikan diri dengan fluktuasi perubahan lingkungan. Dibandingkan proses adaptif yang bersifat genetik dan fisik, perilaku adalah respon yang dianggap paling cepat dari apa yang *organisme* dapat lakukan. Apabila mengacu pada proses belajar, respon perilaku tersebut dianggap pula merupakan tingkatan adaptasi yang paling fleksibel.

Terdapat 2 mode analisis utama pada perilaku ini: yaitu tindakan individu yang didesain untuk meningkatkan produktifitasnya, dan mode yang diperbuat oleh perilaku interaksi individu dengan individu lain dalam kelompok, yang biasanya dibangun oleh aturan yang bersifat *resiprositas*. Perilaku interaktif tersebut didesain juga untuk memenuhi akhir tujuan dan beberapa di antaranya menjadi instrumental.

Konsep kunci adaptasi pada tingkat sosial individu kemudian menjadi perilaku adaptif, tindakan strategis dan sistensis dari keduanya yang disebut strategi adaptasi. Perilaku adaptif merupakan terminologi yang lebih umum dan mengacu pada bentuk perilaku yang menyesuaikan pada tujuan, pencapaian kepuasan, dan putusan. Tindakan strategis dianggap lebih spesifik dan mengacu pada kepentingan khusus yang dipunyai oleh pelaku adaptasi. Dalam tindakan strategis sendiri terdapat konsep yang meliputi; rasionalitas, maksimalisasi, orientasi pencapaian, homo faber dll. Terminologi ke-3, yaitu strategi adaptasi, adalah komponen dari tindakan strategi atau tindakan spesifik dengan tingkatan prediksi keberhasilan, di mana diseleksi oleh individu dalam menentukan keputusannya (Hardestry, 1977).

II. PEMBAHASAN

Kuli Kontrak: Realitas Historis Suku Jawa Di Sumatera

Terjadinya arus migrasi penduduk yang deras dari pulau Jawa untuk menjadi kuli kontrak di Sumatera berlangsung menjelang depresi ekonomi dunia pada awal abad ke-20. Para penduduk miskin di Jawa, terutama yang berada di desa-desa terpencil dibawa ke Sumatera Timur untuk dijadikan pekerja di sejumlah perkebunan. Selain itu, pemerintah kolonial Belanda mengubah kebijakan kolonisasi dengan menciptakan koloni penduduk asal Jawa di perkebunan-perkebunan yang telah mereka buat.

Kebijakan kolonisasi penduduk dari Pulau Jawa ke luar Jawa, khususnya Sumatera sendiri dilatarbelakangi oleh: (1) Melaksanakan salah satu program politik etis, yaitu emigrasi untuk mengurangi jumlah penduduk Pulau Jawa dan memperbaiki taraf kehidupan yang masih rendah; (2) Pemilikan tanah yang makin sempit di Pulau Jawa akibat pertambahan penduduk yang cepat telah menyebabkan taraf hidup masyarakat di Pulau Jawa semakin menurun; dan (3) Adanya kebutuhan pemerintah kolonial Belanda dan perusahaan swasta akan tenaga kerja di daerah-daerah perkebunan dan pertambangan di luar Pulau Jawa.

Politik etis yang mulai diterapkan pada tahun 1900 bertujuan (menurut klaim Pemerintah Kolonial Belanda) untuk menyejahterakan masyarakat petani yang telah dieksploitasi selama dilaksanakannya *culture stelsel* (sistem tanam paksa). Politik etis merupakan politik balas budi, yakni suatu pemikiran yang menyatakan bahwa pemerintah kolonial memegang tanggung jawab moral bagi kesejahteraan pribumi. Pemikiran ini merupakan kritik terhadap politik tanam paksa.

Pembukaan secara besar-besaran *Onderneming* (perkebunan besar) yang dilaksanakan oleh perusahaan perkebunan asing (orang-orang Eropa) baik Hindia Belanda maupun perusahaan asing lainnya yang dilindungi oleh Pemerintah Hindia Belanda. Perkembangan yang pesat dalam pembangunan perkebunan ini dikarenakan pada masa itu Belanda sudah mulai memasuki era *imperialisme* modern dengan memberlakukan Undang-Undang Agraria tahun 1870, bagi seluruh wilayah Hindia Belanda, yang menciptakan iklim kemantapan berusaha bagi para pengusaha Belanda atau orang lainnya.

Bersamaan dengan pesatnya pembukaan lahan baru untuk perkebunan tembakau, tahun 1890–1920 adalah era di mana masuknya gelombang kuli untuk bekerja di perkebunan tembakau swasta milik Belanda di Sumatera Timur (Tanah Deli). Tenaga kerja datang secara besar-besaran dari Pulau Jawa ke Sumatera. Para kuli yang disebut kuli kontrak adalah kebanyakan dari Jawa. Kebanyakan dari mereka tertipu oleh bujukan para agen pencari kerja yang mengatakan kepada mereka bahwa Deli adalah tempat “pohon berdaun uang” (metafora dari pohon tembakau yang bernilai tinggi di Eropah, khususnya Jerman). Para buruh kontrak tersebut dirayu dan dijanjikan kaya raya jika mau ikut ke Tanah Deli, meskipun realitas yang didapat jauh berbeda. Selama puluhan tahun mereka menjalani kehidupan yang sangat tidak manusiawi, upah yang sangat rendah, perlakuan kasar majikan (para tuan kebun dan pemilik *onderneming*).

Tahun 1880 adalah awal kedatangan buruh Jawa ke Deli, dengan masuknya 150 orang dari Bagelan, Purworejo, Jawa Tengah. Jumlah ini mengalir terus, sampai akhirnya mengalahkan jumlah buruh kebun asal Cina dan Tamil, India. Pemerintah kolonial mendorong kedatangan perempuan dari Jawa dan mengizinkan majikan mengerahkan mereka sebagai tenaga kerja penuh. Pada tahun 1905, di antara 33.961 orang kuli kontrak Jawa terdapat 6.290 orang perempuan (Breman, 1997: 67).

Pada tahun 1900-an, liberalisasi ekonomi dipandang sebagai kunci menuju “kemakmuran” di negeri jajahan Belanda, di mana konsentrasi terbesar terletak di Sumatera Timur, saat terjadi ledakan ekspansi kapital swasta di berbagai jenis perkebunan seperti tembakau dan karet. Saat itulah pertumbuhan kuli kontrak dari Jawa mengalami ledakan. Ribuan kuli kontrak didatangkan guna menyulap hutan belantara Sumatera Timur menjadi perkebunan. Para kuli kontrak tinggal di barak-barak perkebunan dengan kondisi mengenaskan, nyaris tanpa kemajuan selain sekedar bisa makan. Serangan penyakit akibat serangan binatang endemik seperti penyakit malaria cukup mewabah pada kalangan kuli kontrak.

Pada tahun 1926 kuli kontrak laki-laki Jawa berjumlah 142.000 orang, sedangkan buruh perempuan Jawa 52.400 orang. Namun, catatan Belanda lainnya menunjukkan tahun 1920 saja, jumlah orang Jawa di Sumatera Timur ada 353.551 orang, melebihi jumlah orang Melayu yang tercatat 285.553 orang. Sampai menjelang Perang Dunia II, 3/5 penduduk Sumatera Timur adalah orang Jawa (Sihaloho, 2006: 430). Pada masa Orde Lama (awal kemerdekaan), kondisi para kuli ini tidak banyak berubah. Kondisi semakin buruk ketika masalah kesulitan pangan di Jawa mengakibatkan terjadi lagi gelombang migrasi besar-besaran dari Jawa ke Sumatera. Pada 1980-an, ketika ekonomi Indonesia mulai memasuki era semi Industri dan jasa, keadaan mulai berubah. Saat itu, pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara mencapai delapan persen pertahun. Hal itu mendorong peningkatan belanja masyarakat. Sektor jasa, perdagangan, dan industri melaju. Karenanya, para kuli kontrak dan keluarganya sebagian mulai bergerak ke kota

untuk bekerja sebagai buruh pabrik, pelayan toko, kuli bangunan, sampai pada wirausaha kecil-kecilan dan juga pembantu rumah tangga.

Pada masa pemerintahan kolonial Belanda, Sumatera Timur merupakan suatu pemerintahan yang bernama Government Van Sumatera, meliputi seluruh pulau Sumatera di bawah kepemimpinan seorang Gubernur yang berkedudukan di Medan. Awal tahun 1949 diadakan reorganisasi pemerintahan di Sumatera. Dengan keputusan Pemerintah Darurat RI tanggal 17 Mei 1949 Nomor 22/Pem/PDRI jabatan Gubernur Sumatera Utara ditiadakan, selanjutnya dengan ketetapan Pemerintah Darurat RI tanggal 17 Desember 1949 dibentuk Provinsi Aceh dan Provinsi Tapanuli/Sumatera Timur yang kemudian dengan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 5 tahun 1950 tanggal 14 Agustus 1950. Ketetapan ini dicabut dan kembali dibentuk Provinsi Sumatera Utara.

Pada 27 Desember 1958, Presiden Soekarno menandatangani Undang-Undang No. 86 mengenai Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda di Indonesia. Tujuannya, selain sebagai alat politik untuk merebut kembali Irian Barat yang pada waktu itu memang masih menjadi perdebatan, juga untuk menjamin kesejahteraan rakyat Indonesia, memperkuat kemampuan nasional dan menghapus diskriminasi ekonomi serta penaklukan ekonomi kolonial. Undang-Undang tersebut juga mengatur ganti rugi bagi pemilik lama untuk mencari penyelesaian hukum di pengadilan Indonesia jika ganti rugi yang ditawarkan tidak memuaskan.

Perkebunan tembakau dinasionalisasi sesuai UU No. 86 Tahun 1958 dan tinggal dua perusahaan perkebunan tembakau yang masih bertahan, yakni Deli Maatschappij dengan 17 wilayah kebun tembakau dan Senembah Maatschappij dengan 5 wilayah kebun tembakau. Salah satu wilayahnya adalah Administrateur van Kwala Namoe (Kini: Kualanamu).

Sesaat setelah pengambil alihan (Nasionalisasi Perkebunan Belanda), eks Senembah Maatschappij berubah nama menjadi Perusahaan Perkebunan Negara (PPN) Baroe Tandjong Morawa. Keboen Kwala Namoe menjadi wilayah bawahan dari PPN Baroe Tandjoeng Morawa. Tetapi hal ini tidak berjalan lama. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 144 tahun 1965, PPN Baroe Tandjong Morawa berubah menjadi PPN Kesatuan Sumut II. Peraturan ini selain merubah kepemilikan juga merubah aset dari perusahaan, di mana sebelumnya PPN Baroe Tandjong Morawa hanya terdiri dari 5 wilayah Kebun (Batang Kwis, Kwala Namoe, Pagar Marbau, Patoembah dan Tanjong Morawa) berubah menjadi PPN Kesatuan Sumut II dengan tambahan 13 wilayah Kebun (Bekalla, Batang Serangan, Tandjong Keliling, Sawit Seberang, Bukit Melintang, Basilam, Bukit Lambasa, Bukit Lawang, Gohor Lama, Glugur Langkat, Marijke, Pabrik Peti, dan Teh Langkat).

Dengan adanya perubahan situasi pada tahun 1965, di mana secara langsung terjadi juga perubahan dalam pola pemikiran dan dalam perekonomian dengan adanya usaha pemerintah Orde Baru untuk merehabilitasi perkebunan-perkebunan negara, maka struktur perkebunan diorganisir kembali sehingga pengelolaan Kebun Gohor Lama/Bukit Melintang berubah nama menjadi Perusahaan Negara Perkebunan II (PNP II) yang berpusat di Tanjung Morawa .

Pada tanggal 11 Maret 1996 kembali diadakan perubahan organisasi perkebunan. PT Perkebunan II yang diresmikan dengan Akte Notaris GHS. Loemban Tobing, SH Nomor 6 tanggal 1 April 1974 dan PT Perkebunan IX yang diresmikan dengan Akte Notaris Ahmad Bajumi, SH Nomor 100 tanggal 18 September 1983 dilebur dan digabungkan menjadi satu dengan nama PT Perkebunan Nusantara II (PTPN II) yang dibentuk dengan Akte Notaris Harun Kamil, SH Nomor 35 tertanggal 11 Maret 1996, dengan kantor pusat di Tanjung Morawa. Di mana Kualanamu adalah tetap menjadi satu wilayah perkebunan dari PTPN2.

Suku Jawa Dan Pembangunan Bandara Kualanamu

Bandara Internasional Kualanamu/Kualanamu International Airport (KNIA) yang dioperasikan pada tanggal 19 September 2013 lalu, merupakan bandara yang paling dibanggakan Indonesia saat ini. Bandara tersebut adalah bandara satu-satunya yang terintegrasi dengan jalur kereta api *train service* di Indonesia. Pemindahan bandara ke Kualanamu telah direncanakan sejak tahun 1992. Sedangkan persiapan pembangunannya diawali pada 1 Agustus 1997. Namun, krisis moneter yang terjadi pada tahun yang sama kemudian memaksa rencana pembangunan ditunda.

Saat baru diresmikan, masyarakat Indonesia sangat mengagumi bandara internasional ini. Bahkan masyarakat Sumatera Utara berbondong-bondong mendatanginya, bukan hanya mereka yang berpergian dengan pesawat, namun juga masyarakat umum yang hanya ingin sekedar melihat kemegahannya dan berwisata lokal. Pemerintah Indonesia sangat membanggakannya di tingkat internasional. Tetapi hanya sedikit sekali orang yang mengetahui bahwa proses pembangunan bandara internasional ini, terutama dalam hal pembebasan lahannya, mengorbankan sedikitnya 71 keluarga, 237 jiwa yang tergusur dari pemukimannya.

Selama hampir 15 tahun, dari tahun 1997 sampai 2012, 71 keluarga masyarakat korban pembangunan bandara Internasional Kualanamu ini memperjuangkan hak mukim, eksistensi, daya bertahan hidup, dan politik agraria mereka dengan didampingi Non-Government Organisation (NGO) pendamping selama 13 tahun tanpa henti. Teramat banyak kisah dan fakta-fakta menarik, mengharukan sekaligus mengenaskan selama proses masa perjuangan masyarakat Kualanamu yang akhirnya tersingkir juga dari kemegahan modernisasi bandara tersebut.

Pada tanggal 23 dan 24 September 1999 warga yang mayoritas suku Jawa melakukan demonstrasi di Kantor Gubernur Sumatera Utara untuk menuntut penyelesaian kasus tersebut. Masyarakat diterima oleh Wakil Gubernur Sumatera Utara, Bapak Abdul Wahab Dalimunthe (masa itu). Wakil Gubernur Sumatera Utara hanya mengatakan, dengan berlakunya otonomi daerah Januari 2000 nanti, semua persoalan diselesaikan oleh Pemerintah Kabupaten.

Berulang kali warga melakukan unjuk rasa dan berbagai upaya non litigasi lainnya, termasuk pada 10 Desember 2004, warga melakukan unjuk rasa agar DPRD Sumut mendesak pemerintah segera melakukan penyelesaian kasus tersebut dengan cara relokasi. Relokasi merupakan konsep yang dibangun warga untuk dapat mewujudkan mimpi mereka untuk dibuatkan suatu kampung yang sama pada tempat yang berbeda.

Lahan pembangunan bandara Kualanamu berasal dari bekas Hak Guna Usaha (HGU) PTPN II yang diambil alih oleh PT. Angkasa Pura II dengan mengkompensasi sejumlah uang milyaran rupiah. Di pihak lain, PTPN II tidak mau memberikan ganti kerugian terhadap warga yang telah lama menduduki lahan yang akan digunakan sebagai bandara tersebut. PTPN II tidak mengajak warga untuk bermusyawarah bagaimana jalan terbaik untuk melakukan pembangunan, namun malah mengintimidasi warga untuk segera membongkar rumahnya atau akan dibongkar secara paksa.

Pembangunan bandara di Pasar VI Kualanamu tidak hanya berdampak akan menghilangkan sejarah masyarakat Jawa Kualanamu saja, namun juga budaya, adat kebiasaan, tatanan sosial, hubungan kekerabatan. Kultur agraris masyarakat berbenturan dengan modernisasi.

Dampak yang paling terasa dari suatu pembebasan tanah masyarakat adalah bertambahnya beban hidup masyarakat. Hal ini dapat dilihat bagaimana masyarakat yang dahulu hidup sebagai buruh dan dalam masa perkembangannya kemudian bercocok tanam di sekitar pekarangan. Ketika warga telah terusir dari pemukiman, mereka tidak bertani lagi jadi semua kebutuhan hidup akan mereka harus dibeli. Beban ekonomi yang lain adalah biaya untuk membuat rumah baru serta biaya untuk pindah anak-anak sekolah dan berbagai biaya hidup lainnya.

Dampak ekonomi bukan hanya mempengaruhi kehidupan warga Jawa Pasar VI Kualanamu, namun juga berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat sekitar bandara. Masyarakat telah tergiur rupiah yang ditawarkan masyarakat kota sehingga mereka beramai-ramai menjual tanahnya kepada orang dari kota yang memiliki sejumlah uang. Lahan yang selama ini mereka gunakan sebagai tempat mencari nafkah sekarang telah berubah menjadi lahan-lahan untuk komplek perumahan, komplek pertokoan, pergudangan, rumah makan, penginapan dan industri.

Dari serangkaian diskusi dan kajian khusus yang dilakukan masyarakat Jawa Kualanamu, akhirnya mereka mengeluarkan tuntutan, yaitu pemukiman baru yang layak dan tersedianya sedikit lahan bercocok tanam di luar lokasi pembangunan bandara yang tidak jauh dari pemukiman. Jika pemerintah tidak dapat menyediakan hal tersebut, maka alternatifnya adalah, ganti rugi yang layak dalam bentuk uang yang dapat dimanfaatkan untuk membuat desa baru (pemukiman baru) atau relokasi warga dan cukup untuk dibelikan lahan pertanian pangan sekitar 2000 m per kepala keluarga.

Masyarakat Jawa Kualanamu juga meminta perbaikan kondisi kehidupan secara terus-menerus serta memperoleh penyelesaian atas persoalan yang berkaitan dengan hak akses dan keadilan dalam konteks korban pembangunan serta memperoleh hak-hak lainnya sebagaimana layaknya warga negara yang merdeka. Guna melancarkan tuntutan, beberapa rencana tindak lanjut yang dilakukan masyarakat Jawa Kualanamu antara lain adalah aksi, delegasi, kampanye, seminar. Melalui empat cara ini warga mengingatkan kembali dan mendesak DPRD Sumut agar mampu mengakomodir tuntutan warga untuk mendapatkan pemukiman baru.

Warga juga menggelar pertemuan lanjutan antar warga pemukim dengan semua pihak yang terlibat pembangunan bandara, membentuk tim penyelesaian sengketa (*alternative dispute resolution*) serta meminta DPRD Sumut agar melahirkan kebijakan pembangunan berperikeadilan untuk memberikan permukiman kembali bagi 71 keluarga yang menjadi korban pembangunan bandara.

Banyak upaya negosiasi yang dilakukan, persoalan yang dialami oleh warga, namun tidak kunjung menampakkan hasil yang menggembirakan. Janji dan komitmen dari banyak pihak, khususnya Pemerintah dan PT Angkasa Pura II, masih sebatas wacana. Bahkan, dalam waktu-waktu tertentu tindakan sepihak seperti upaya okupasi, teror, dan mobilisasi kekuatan untuk mengeliminasi kekuatan warga, masih terus dilakukan pihak-pihak yang ingin para pemukim keluar dari tembok pembangunan bandara.

Strategi Adaptasi Yang Tak Sesuai Harapan

Dari awal bukan hanya warga Pasar VI Kualanamu saja yang “*menentang*” terhadap pembangunan bandara internasional Kualanamu. Masyarakat yang tanah dan pemukimannya terkena dampak pembangunan bandara juga melakukan perjuangan terhadap hak-hak mereka, terutama tentang ganti rugi.

Pada awalnya paling sedikit ada 3 kelompok masyarakat yang memperjuangkan haknya terhadap dampak pembangunan bandara. Kelompok masyarakat tersebut antara lain: kelompok masyarakat Pasar VI Kualanamu yang berada langsung di dalam tembok perencanaan pembangunan bandara, kelompok warga *eks* pemukim pensiunan ABRI (kini TNI) di Desa Ramunia dan kelompok masyarakat Dusun Wonogiri, Desa Pasar V Kebun Kelapa.

Setelah diresmikanpun bandara ini tetap mendapat tentangan dari warga. Berbagai pihak yang merasa masih dirugikan melakukan berbagai upaya untuk mendapatkan keadilan. Hingga saat akan diresmikan (*grand launching*) oleh Presiden SBY-pun masih ada ancaman demonstrasi dan bahkan bukan hanya ancaman, namun ada kelompok masyarakat yang merealisasikan ancamannya tersebut dengan aksi demonstrasi memblokir jalan masuk menuju bandara sehingga terjadi bentrokan dengan aparat

keamanan dan penangkapan warga yang dianggap sebagai pimpinan aksi oleh aparat keamanan.

Sedangkan masyarakat Pasar VI Kualanamu, meskipun melakukan perlawanan atas ketidakadilan yang mereka alami, tapi nasib tergusur tetap saja harus dijalani. Akhirnya, dengan ganti rugi seadanya, mereka pindah, bukan direlokasi seperti yang mereka harapkan. Beberapa ada yang pergi ke luar daerah.

Penggusuran tersebut menyisakan trauma bagi warga Pasar VI Kualanamu. Tak sedikit dari mereka yang sakit akibat trauma mendalam dan gangguan pikiran akibat penggusuran ini, ada pula yang meninggal dunia. Mereka yang tergabung dalam perkumpulan Kerukunan Warga Masyarakat Lemah (KWML) sebagai wadah organisasi untuk memperjuangkan hak ini memang tak berdaya dan lemah. Persis seperti makna nama organisasinya. KWML akhirnya terpaksa menerima dialihkan ke luar tembok dari dalam kawasan bandara. Sementara pihak PTPN II dan pengembang pembangunan bandara, tidak memberikan kompensasi layak. Bahkan beberapa warga yang pernah bekerja sebagai karyawan PTPN II mengaku belum menerima Santunan Hari Tua (SHT).

Tragedi penggusuran warga desa Pasar VI Kualanamu menambah deretan panjang daftar masyarakat yang dikorbankan oleh pembangunan di Indonesia. Bukan hanya soal tempat tinggal, warga yang tergusur tersebut mengakui bahwa secara ekonomi kehidupan mereka tidak lebih baik dibanding masih berada di dalam tembok. Berbagai upaya dan perjuangan telah mereka lakukan sampai ke tingkat nasional dan internasional, namun berakhir dengan kekalahan.

Pelanggaran hak asasi manusia yang telah dinyatakan oleh Komnas HAM pun tidak dihiraukan oleh negara sebagai pihak pelanggar. Negara mengingkari Komisinya sendiri yang dibentuk melalui undang-undang yang diciptakan oleh negara pula. Hal ini menjadi satu persoalan yang amat problematis bagi korban pembangunan. Modernisasi dalam konteks ini diwakili oleh pembangunan bandara Kualanamu telah memecah belah masyarakat Jawa Kualanamu. Hubungan antar warga dan satu desa yang dipisahkan oleh tembok pembangunan menjadi sangat buruk. Warga yang di luar tembok selalu mengatakan bahwa warga yang ada di dalam tembok adalah orang yang tidak *manut*, *nurut* dan *nunut*. Menjadi cemoohan, seolah-olah warga yang berada di dalam tembok telah melakukan suatu hal yang hina atau melanggar hukum berat. Bahkan lebih kasar lagi warga yang ada di dalam tembok dikatakan *pembangkring* oleh warga yang berada di luar tembok (sesama warga desa Pasar VI Kualanamu).

Bukan hanya hubungan antar warga saja yang terpecah, bahkan Kepala Desa sebagai pemimpin rakyat desa juga menentukan sikap dengan pindah ke luar tembok. Sikap tersebut dianggap oleh warga bukan sikap yang mengayomi. Bahkan lebih jauh lagi tidak dapat dikatakan netral. Perasaan dan mental warga di dalam tembok semakin menyurut sepeninggal pimpinan desa mereka yang sebelumnya berpihak pada perjuangan. Sikap Kepala Desa tentunya jauh dari sikap pemimpin *wakil Tuhan* seperti yang termaktub dalam kitab *Serat Wulangreh Macapat*, menurut orang Jawa.

Operasi pemecah-belahan kekerabatan, antar warga dan sanak keluarga dilancarkan oleh pihak pengembang pembangunan bandara, PTPN II bersama aparat kabupaten, kecamatan dan desa juga para operator lapangannya. Berbagai upaya pendekatan kepada sanak saudara yang ada di luar tembok untuk melakukan rayuan pada keluarganya yang masih berada di dalam tembok segera ke luar tembok.

Operasi pengusiran menggunakan kekerabatan ini menimbulkan akibat luar biasa bagi pertalian persaudaraan masyarakat Jawa Kualanamu. Terjadi perpecahan pertalian persaudaraan secara permanen bagi warga. Seperti yang dituturkan oleh Ibu Musijah (67 thn) istri almarhum Kusran (meninggal Agustus 2002) yang kini tinggal di dusun Lestari, Desa Pasar V Kebun Kelapa. Pindah (ke luar tembok) pada tahun 2012.

“Setelah Bakir keluar dari dalam tembok, dia selalu merayu agar Aku juga keluar dari dalam tembok, tapi rayuan dia baik-baik, caranya. Katanya

Bakir disuruh oleh perkebunan untuk merayu saudara-saudaranya yang masih ada dalam tembok supaya keluar. Berbeda dengan Mariono, adikku yang di kampung (bukan berasal dari dalam tembok), dia selalu memaksaku keluar dengan kata-kata yang kasar. Dia bilang, “Kakak kok *bandel* kali, apa tidak takut rumahnya *disorok, didoser?*” Adikku yang lainnya juga merayu dan memaksaku pindah.”

Musijah (67 tahun) (tanggal 11 Juli 2015).

Banyak kejadian lain, saat proses perjuangan berlangsung, yang berbentuk kemarahan untuk mengekspresikan perlawanan warga Pasar VI Kualanamu pada pihak-pihak yang mengintimidasi mereka. Masyarakat Jawa Kualanamu telah berubah dari sifat orang Jawa aslinya. Keterdesakan hidup mereka menimbulkan adaptasi. Dari orang Jawa yang *lemah lembut*, suka mengalah, tidak suka marah, menjadi orang Jawa yang *beringas* dan *pelawan*.

Segala hal negatif seperti kemarahan terjadi pada hampir semua pihak yang datang untuk mendesak masyarakat Jawa Kualanamu keluar dari tembok. Perlawanan juga diekspresikan dengan pembentukan organisasi perjuangan KWML, masyarakat rajin berkumpul untuk saling belajar dan mendiskusikan persoalan mereka, berdelegasi kepada pihak-pihak yang diharapkan dapat ikut membantu penyelesaian persoalan mereka. Membuat konsep surat dan mengirimkannya pada berbagai pihak yang dianggap sebagai pihak yang berkompeten menyelesaikan masalah dan membuat konsep-konsep secara kolektif, aksi demonstrasi untuk melakukan *pressure* agar masalah mereka cepat diselesaikan oleh pemangku tanggung jawab dan berbagai upaya lainnya.

III. KESIMPULAN

Masyarakat Jawa Kualanamu terbentuk dari kuli kontrak yang dibawa oleh perusahaan perkebunan (*onderneming*) dibantu pemerintah kolonial Belanda ke Tanah Deli (Sumatra Timur – kini Sumatera Utara) pada tahun 1890-an untuk menjadi buruh perusahaan perkebunan tembakau Belanda. Setelah masa nasionalisasi perkebunan Belanda, masyarakat Jawa Kualanamu secara turun-temurun bekerja pada perkebunan baru, perusahaan dan lahan asal nasionalisasi yang dibentuk pemerintah Republik Indonesia. Mereka hidup dengan menjalankan filosofi, sosio-kultural, ekonomi tradisional dan kearifan lokal adat budaya orang Jawa seperti di tempat asalnya Pulau Jawa, namun telah mengalami sedikit perubahan-perubahan.

Perencanaan pembangunan bandara internasional Kualanamu telah dimulai sejak tahun 1991. Masyarakat Jawa Kualanamu terancam tergusur dari pemukiman di mana 4 generasi masyarakat telah menetap di sana. Ancaman ini membuat mereka gusar dan berupaya mencari cara, sebagai bentuk strategi adaptasi, untuk menyelamatkan pemukiman dan lahan pertanian. Mendapatkan dukungan materil, moril dan intelektual, merupakan strategi perjuangan yang dilakukan dengan damai (*non violence*/tanpa kekerasan). Saat itu muncul perubahan pola pikir masyarakat Jawa Kualanamu. Mereka melakukan perlawanan untuk tetap bertahan pada tanah berpijaknya. Perlawanan dilakukan dengan berbagai cara dan organisasi modern dengan dukungan dari berbagai pihak yang simpati.

Awalnya perlawanan bertujuan mempertahankan kampung halamannya, kemudian berubah (bentuk filosofi *manut* dan *nunut* yang dipengaruhi oleh kultur orang Jawa) dengan menurunkan target tujuan, yakni memperjuangkan relokasi (pemindahan kolektif warga). Tuntutan relokasi merupakan tuntutan minimalis dari masyarakat Jawa Kualanamu. Penurunan target perjuangan masyarakat Jawa Kualanamu tersebut juga merupakan satu bentuk adaptasi dari keterdesakandan tidak punya pilihan.

DAFTAR PUSTAKA

- Chambers, Robert. (1987). *Pembangunan Desa, Mulai Dari Belakang*. Jakarta: LP3ES.
- Geert, Clifford. (1973). *Penjaja & Raja, Perubahan Sosial dan Modernisasi Ekonomi di Dua Kota Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Ihromi, T.O. (2006). *Pokok-Pokok Antropologi Budaya*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Koentjaraningrat dan Emmerson, K. Donald (Ed.). (1982). *Aspek Manusia dalam Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia & Gramedia.
- Lewis, Oscar. (1988). *Kisah Lima Keluarga*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Marzali, Amri. (2009). *Antropologi & Pembangunan Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Mulyana, Deddy & Jalaluddin Rakhmat. (2006). *Komunikasi Antarbudaya: Panduan Berkomunikasi dengan Orang-Orang Berbeda Budaya*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Simanjuntak, Antonius Bungaran. (2009). *Konflik Status dan Kekuasaan Orang Batak Toba*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Susan, Novri. (2010). *Pengantar Sosiologi Konflik dan Isu-Isu Konflik Kontemporer*. Jakarta: Kencana.
- Wiradi, Gunawan. (2009). *Reforma Agraria, Perjalanan yang Belum Berakhir*. Jakarta: KPA, Sajogjo Institute & Akatiga.